



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAIFUDDIN
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 105895

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.385.435.400**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m2/160 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 551.029.500
2. Tanah Seluas 445 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 179.090.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 290.285.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/147 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 744.880.000
5. Tanah Seluas 1805 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 60.725.200
6. Tanah Seluas 1840 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 60.725.700
7. Tanah Seluas 2202 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 123.700.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , WARISAN Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **221.190.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 89.000.000



2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 96.500.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.690.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	278.655.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	10.102.871
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	90.400.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.985.783.271
III. HUTANG	Rp.	444.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.541.783.271

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.